

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta: PT Indeks, 2009).

Adi Nugroho, Susanti, Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktir Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Amrih, Ivida Dewi dan Herowati Poeseoko, Hukum Kepailitan-Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011).

Asikin, Zainal, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Bachtiar, Herlina Suyati, Aspek Legal Kredit Sindikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Djumahana, Muhammad, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Fuady, Munir, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti).

- _____, Hukum Perbankan Modern, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999).
- Gazali, Djoni S, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993).
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).
- Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Sastrawidjaja, Man S, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Alumni, 2014).
- Sinungan M, Managemen Dana Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).
- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, (Jakarta: Grafiti, 2002).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008).
- Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, (Jakarta: Prenamedia Group, 2004).
- Supramono, Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).
- Suryabrata, Sumadi, 2004, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan, (Surabaya: Revka Petra Media, 2001).

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Kepailitan,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, Investasi Bank dan Lembaga
Keuangan, (Yogyakarta: ANDI, 2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Untuk Pengadaan Tanah Dan/Atau Pengolahan Tanah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Untuk Pengadaan Tanah Dan/Atau Pengolahan Tanah

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomot 6/33/UPK mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/26/UPK
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005
- Surat Keputusan Nomor 21/50/KEP/DIR mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993

Jurnal

- Elviana Sagala, SH, M.Kn., Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit, Jurnal Ilmiah “*Advokasi*”, (Vol. 03 No. 01/01 Maret 2015).
- Giovanni Arethusa, Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Dalam Pembiayaan Proyek Yang Sifatnya Sindikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Juditia Damlah, Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lex Crimen, (Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017).
- Lidya Nathalia Honandar, Kajian Yuridis Terhadap Kredit Sindikasi Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia, Lex Crimen, (Vol. VI/No. 9/Nov/2017).
- Mohamad Kharis Umardani, Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI), ADIL: Jurnal Hukum , (Vol. 7 No.1).

Internet

- <https://kbbi.web.id/bank>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>
- <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi>
- <https://www.bankdki.co.id/en/product-services/commercial-corporate/kredit-sindikasi>